

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025 - 2029



DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya jualah maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap perangkat daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan dan disusun guna menyediakan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan

Akhirnya dengan disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 semoga dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun. Terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 – 2029 ini. Saran dan masukan dari semua pihak kami harapkan demi perbaikan yang lebih lanjut

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025


KEPALA DINAS
SUHARYA ALGIANI, S.STP., M.Si
NIP. 19781231 199711 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Pembahasan.....	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya	14
2.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan	18
2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2015-2019	18
2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	26
2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan	26
2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
2.9. Penentuan Isu – Isu Strategis	33
 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	36
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.	37
 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD dan Pendanaan	39
4.2. Kinerja Pelayanan Bidang Urusan	78
 BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
Tabel 2.1.	Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025.....	17
Tabel 2.2.	Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	17
Tabel 2.3.	Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2025.....	18
Tabel 2.4.	Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	18
Tabel 2.5.	Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 – 2024.....	21
Tabel 2.6.	Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024-2026.....	26
Tabel 2.7.	Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan.....	27
Tabel 2.8.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	29
Tabel 2.9.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang.....	31
Tabel 2.10.	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	35
Tabel 2.11.	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	36
Tabel 3.1.	Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	43
Tabel 3.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025– 2029.....	44
Tabel 3.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.....	45
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra PD.....	51
Tabel 4.1.	Tehnik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	
Tabel 4.2.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026 – 2030.....	61
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan	
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.....	77

DAFTAR GAMBAR

No.	Halaman
1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD bersifat makro, yang memuat visi, misi dan program prioritas serta rencana penganggaran. RPJMD merupakan kesepakatan para pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah mengenai program prioritas 5 (lima) tahun kedepan yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor penyusunan program pembangunan.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappangtahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sidenreng Rappang terpilih, dalam hal ini untuk bidang urusan peternakan dan perikanan terfokus pada misi I yaitu Membangun Struktur Perekonomian Daerah yang Kuat melalui percepatan pengembangan Agrobisnis menuju Agroindustri pad sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Tahapan penyusunan rencana strategis perangkat daerah mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025-2029 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu VISI “ **SIDENRENG RAPPANG MAJU DAN SEJAHTERA**” dan 7 Misi dimana Dinas Peternakan dan Perikanan focus pada Misi 1 : **Membangun Struktur Perekonomian Daerah yang Kuat melalui percepatan pengembangan Agrobisnis menuju Agroindustri pada sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan** serta memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program

[illegible]

**Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektor lainnya**



1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang mempedomani dokumen RPJMN tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional atau regional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-

2029 berpedoman dan dilakukan simultan pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045, dan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2045, khususnya pentahapan periode pertama dari pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi”.

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025- 2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dalam menetapkan prioritas Pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032. RTRW mengatur tata ruang suatu wilayah dalam jangka panjang. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang memperhatikan dan sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam menetapkan prioritas pembangunan dengan memperhatikan penataan ruang yang telah ditetapkan.
5. Dokumen KLHS RPJMD. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan keberlanjutan, sehingga terdapat keseimbangan antara Pembangunan dan pelestarian.
6. Dokumen Perencanaan lainnya. Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yang telah tersusun, antara lain dokumen Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Sidenreng Rappang dan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Sidenreng Rappang, Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui perencanaan dan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan daerah

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029, mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pendoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menjabarkan RPJMD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang terutama yang terkait dengan urusan Peternakan dan Perikanan. Selanjutnya renstra ini juga menjadi arahan dan acuan serta pedoman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan bersama masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang peternakan dan perikanan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pelaksanaan amanat pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang peternakan dan perikanan;
2. Menjabarkan kondisi dan prospek perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Merumuskan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029;
4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renstra mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025, dengan demikian maka dokumen perubahan renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 -2029 disusun dengan sistematika seperti berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang pengertian renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunannya, keterkaitan renstra dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, renstra K/L dan renstra provinsi/kabupaten/kota serta dasar perubahan renstra

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Peternakan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui renstra ini. Pada bagian ini juga dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasinya, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumberdaya

Memuat penjelasan ringkas tentang berbagai jenis sumberdaya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya.

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Bagian ini menyajikan informasi sasaran pelayanan.

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada renstra K/L, sasaran jangka menengah dari renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Peternakan dan Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perumusan kebijakan Tekhnis di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pemberi dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan, Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri atas :

a. Kepala Dinas

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Peternakan dan Perikanan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang peternakan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan administarsi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Tugas : Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

b.1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

b.2 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : Mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum lingkungan dinas.

c. Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan

Tugas : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembibitan dan kesehatan hewan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pembibitan dan kesehatan hewan.

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan dan kesehatan hewan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

d. Kepala Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Perumusan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- b. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

e. Kepala Bidang Perikanan

Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang Perikanan.

Fungsi : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perikanan;
- c. Penyiapan bimbingan tekhnis dan supervisi dibidang perikanan;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perikanan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan

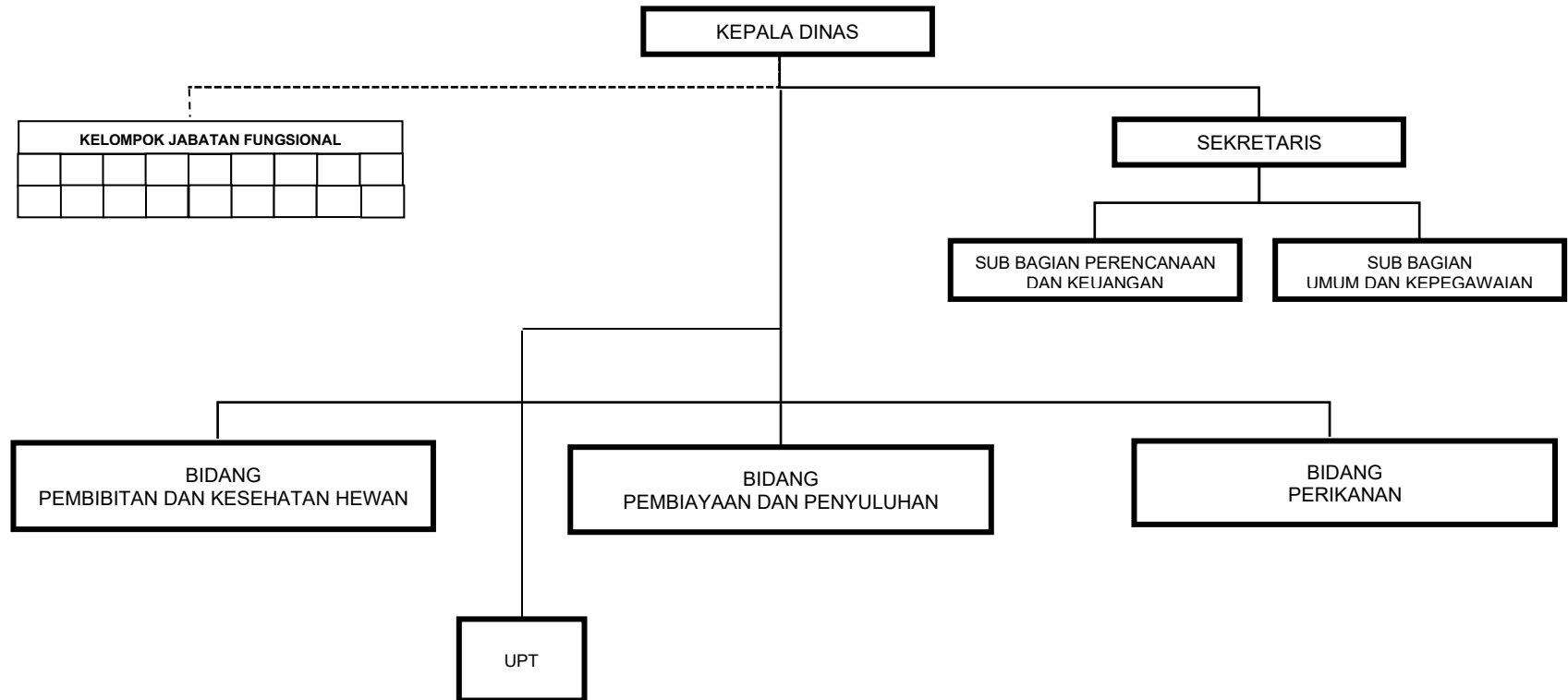
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas : Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pembibitan dan Kesehatan Hewan
4. Bidang Pembiayaan dan Penyuluhan
5. Bidang Perikanan
6. Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Struktur Organisasi
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
(Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023)



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

2.2. Sumberdaya

a. Pangkat dan Golongan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

No	Pangkat / Golongan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Madya, IV/d	1	1	2
2	Pembina Utama Muda, IV/c	5	7	12
3	Pembina Tk.I. IV/b	5	3	8
4	Pembina IV/a	8	4	12
5	Penata Tk. I, III/d	11	3	14
6	Penata, III/c	4	3	7
7	Penata Muda Tk.I, III/b	3	7	10
8	Penata Muda, III/a	3	4	7
9	Pengatur Tk. I, II/d	1	-	1
10	Pengatur, II/c	1	-	1
11	Kelas X	-	2	2
12	Kelas IX	4	8	12
13	Kelas V	2	2	4
	Jumlah	47	44	91

b. Tingkat Pendidikan

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Magister (S.2)	10	7	17
2	Magister (S.1)	29	28	57
3	D.IV	1	-	1
4	D.III	-	-	-
5	SLTA	9	4	13
6	Profesi			
		49	42	91

c. Eselon

Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Keadaan Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Eselon Tahun 2025

No	Jabatan	Jenis Kelamin (Orang)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	-	1	1
2	Eselon III.a	1	-	1
3	Eselon III.b	-	3	3
4	Eselon IV	5	1	6
5	Staf	24	10	34
6	Fungsional	19	27	46
		49	42	91

Selain personil aparatur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki sejumlah aset. Aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Aset Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
1	TANAH			
	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	APBD, Hibah
	2	Tanah Untuk Pengembangan Peternakan	3	
	3	Tanah Untuk Pengembangan Perikanan	5	
	4	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	
2.	PERALATAN DAN MESIN			
	1	Alat Angkutan		
		Kendaraan Roda 4	4	APBD
		Kendaraan Roda 2	80	
		Kendaraan Roda 3	4	
		Alat Angkut Air	17	
		Air Blower	4	
		Mesin Pembuat Pelet	5	
	2	Alat Peternakan/Perikanan		
		Alat Peternakan		
		Insemination Gun	13	
		Gunting Plat tangan	21	
		Alat Peternakan lainnya	13	
		Alat Perikanan		
		Keramba Jaring	3	
		Ph Meter	1	
		GPS	3	
		Timbangan	5	
		Traktor tangan	3	
		Alat pengering	1	
		Soil tester	5	
		Alat laboratorium	2	
		Alat pasca panen	2	
		KJA	3	
		Hapa	1	
		Bak Fiberglass	18	
		Bak Aquarium	4	
		Bak Blower	8	
		Kabel Roll	2	
	3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	15	
		Laptop	2	
		Note book	14	
		AC Central	1	
		AC Split	4	

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
	TV	2	
	PC Unit	2	
	Monitor	1	
	Printer	10	
	Portable Hard Disk	6	
	Handycam	1	
	Sound System	2	
	Camera Elektronik	2	
	Power Amplifier	1	
	Stabilizing amplifier	1	
	Alat komunikasi radio lainnya	2	
	Reach In Freezer	2	
	Mesin Ketik Standar	4	
	Mesin Pemotong rumput	10	
	Mesin Jahit	1	
	Mesin Genset	5	
	Filling Kabinet Besi	2	
	Brankas	1	
	Lemari Besi	3	
	Lemari Kaca	8	
	Lemari Kayu	13	
	Lemari Es	6	
	Meja Rapat	18	
	Kursi Kayu	3	
	Kursi Rapat	100	
	Kursi Kerja Pejabat	5	
	Tempat Tidur Kayu	18	
	Meja Kerja Pejabat	7	
	Meja komputer	2	
	Meja Kerja Kayu	23	
	Pompa Air	25	
	Tandon Air	11	
	Alat Pelindung	1	
	Pelampung	30	
5	Alat Laboratorium		
	Timbangan / Neraca	5	
	Microscope dengan Camera	1	
	Tangki Liquid Nitrogen	1	
	Carrying case	1	
	Bunsen Burner dan kelengkapannya	4	
	Hammer Mil	1	
	Container N2 Cair	2	
	Alat laboratorium biologi perairan	2	
	Alat laboratorium lainnya	4	
	DO Meter	5	
	Plankton net	28	

No	Jenis Aset		Jumlah	Keterangan
	6	Alat Kedokteran		
		Alat Kedokteran Umum	10	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN			
		Bangunan Gedung kantor perumahan	14	
		Bangunan Gedung kantor lain-lain	2	
		Bangunan kantor tertutup	6	
		Bangunan Gedung	2	
		Bangunan Gedung lain-lain	2	
		Bangunan Gedung Laboratorium permanen	1	
		Bangunan gedung pertemuan permanen	2	
		Gedung pertokoan/koperasi/pasar permanen	1	
		Gedung Pos jaga permanen	4	
		Gedung pemotong hewan	1	
		Bangunan untuk Kandang	10	
		Bangunan gedung tempat kerja lainnya	15	
		Bangunan tempat kerja lain-lain	8	
		Mess/ wisma/bangunan	4	
		Pagar	11	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
		Jalan khusus kompleks	12	
		Jembatan khusus lain-lain	1	
		Sumur dengan Pompa	2	
		Saluran induk	3	
		Bangunan Pembawa irigasi	1	
		Bangunan pintu airf	10	
		Waduk pasang surut	1	
		Saluran tersier pembuangan	1	
		Bangunan pemasuka/pembuangan	27	
		Kolam pasang surut	49	
		Saluran tersier	1	
		Bangunan pembuangan pengaman sungai	1	
		Sumur artesis	4	
		Bangunan box tersier	1	
		SCL	1	
		Jaringan Transmisi lain-lain	1	
5	Aset Lainnya			
	2	Binatang Ikan	14	

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2020 - 2024

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dari segi kinerja pelayanan dan penganggaran sejak Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kontribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan terhadap PDRB	%	0,65	1,21	1,24	1,33	1,29	1,21	1,33	1,34	1,33	1,29	186	110	108	100	100	
2	Kontribusi peternakan terhadap PDRB	%	5,62	5,62	5,83	6,04	-	4,19	4,24	4,17	4,30	4,4	75	75	72	71	-	
3	Persentase Produksi Periknan Tangkap	%	-	100	100	100	100	-	100	94,38	100	82	-	100	94	100	82	
4	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	1.796	2.691,50	2.745,37	2.800,28	2.856,27	2.804,30	2.692,80	2.591,10	2.080,52	2.334,00	156	100	94	74	82	
5	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	-	1	1	1	5	-	1	1	1	5	-	100	100	100	100	
6	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap	Unit	-	515	113	5	-	-	515	113	5	-	-	100	100	100	-	
7	Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil	%	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100	
8	Jumlah Nelayan Yang Mengikuti Pelatihan	Org	-	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-	100	-	-	-	
9	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Org	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100	
10	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	
11	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	581,00	611,09	641,64	673,72	1.350,00	567,30	1.351,61	1.465,03	1.216,45	1.488,42	98	221	228	181	110	
12	Jumlah Tenaga Kerja Non PNS	orang	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
13	Jumlah Pakan	kg	1.018	-	-	-	-	1.018	-	-	-	-	100	-	-	-	-	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
14	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan	Klp	20	-	-	-	-	11	-	-	-	-	55	-	-	-	-	
15	Jumlah Calon Induk	ekor	1.361	-	-	-	-	1.361	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
16	Jumlah Pakan Calon Induk	zak	43	-	-	-	-	43	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
17	Jumlah Sarana BBI	m3	460	-	-	-	-	460	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
18	Jumlah Paket Pakan Mandiri	paket	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	33	-	-	-	-	
19	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Unit	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
20	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Ikan	Pkt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Jumlah Benih Ikan yang Ditebar	Ekor	378.000	-	-	-	-	378.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
22	Jumlah TPI yaag Dibangun/Direhab	Unit	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
23	Jumlah ternak sapi	Ekor	41.675	-	-	-	-	35.947	-	-	-	-	86	-	-	-	-	
24	Jumlah ternak kambing	Ekor	6.916	-	-	-	-	6.019	-	-	-	-	87	-	-	-	-	
25	Jumlah ternak ayam buras	Ekor	770.284	-	-	-	-	565.753	-	-	-	-	73	-	-	-	-	
26	Jumlah Kecamatan Lokasi Pelayanan Inseminasi Buatan yang Efektif dan efisien dalam mendukung UPSUS SIWAB	Kec	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
27	Terwujudnya Pengembangan Agribisnis	Klpk	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
28	Jumlah Dosis Vaksinasi Massal	Dosis	8.930	-	-	-	-	8.930	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
29	Jumlah laporan informasi harga pasar produksi peternakan	dok	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
30	Jumlah keikut sertaan dalam pameran	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	Jumlah sarana dan prasarana teknologi peternakan	Unit	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
32	Meningkatnya kapasitas penyuluh peternakan	orang	37	-	-	-	-	36	-	-	-	-	97	-	-	-	-	
33	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	Unit	-	6	3	1	-	-	6	3	-	-	-	100	100	-	-	
34	Waktu Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Bln	-	9	9	-	-	-	6	9	-	-	-	67	100	-	-	
35	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	Unit	-	9	10	10	3	-	9	10	10	3	-	100	100	100	100	
36	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	
37	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	-	65	70	75	70,00	-	111	90	75	70,00	-	171	129	100	100	
38	Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Org	-	273	294	294	294,00	-	303	309	294	294,00	-	111	105	100	100	
39	Jumlah Wilayah Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Kec	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100	100	-	-	
40	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	dok	-	-	-	2	4	-	-	-	2	4	-	-	-	100	100	
41	Jumlah Produksi Daging	kg	-	7.008.698	5.127.388	5.358.011	3.212.708	-	2.750.266	1.510.999	2.139.511	2.541.476	-	39	29	40	79	
42	Jumlah Produksi Telur	kg	-	76.814.736	80.005.124	83.362.100	54.997.045	-	49.903.530	44.265.103	41.843.861	45.031.501	-	65	55	50	82	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
43	Persentase Akseptor Yang Dilayani	%	-	10	10	-	10,00	-	9	10	-	10,00	-	92	100	-	100	
44	Jumlah Ternak Yang Lahir dari Inseminasi Buatan	Ekor	-	2.930	4.216	-	12	-	4.739	4.392	-	12	-	162	104	-	100	
45	Persentase Ternak Yang Disebar	%	-	100	100	100	100,00	-	100	280	100	100	-	100	280	100	100	
46	Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak	Ekor	-	2.000	11.525	4.892	-	-	8.437	32.225	4.892	-	-	422	280	100	-	
47	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	ekor	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	100	
48	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	%	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	
49	Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian (%)	%	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	
50	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun, direhab dan dipelihara (Unit)	unit	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	
51	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	%	-	21	21	21	21	-	21	21	21	21	-	100	99	100	100	
52	Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	%	-	20	20	20	20	-	20	20	20	20	-	100	100	100	100	
53	Jumlah Dosis Vaksinasi Massal	Dosis	-	4.800	8.300	11	12	-	4.800	8.300	11	12	-	100	100	100	100	
54	Pesentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi persyaratan Teknis Kesmavet	%	-	-	50	75,00%	75,00	-	-	75	75,00%	75,00	-	-	149	100	100	
55	Jumlah Unit Usaha hewan dan Produk Hewan yang Didampingi Untuk Memenuhi Persyaratan Kesmavet	unit	-	-	4	4	4	-	-	4	4	4	-	-	100	100	100	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun ke					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
56	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian	%	-	100	71	100	100	-	100	252	100	100	-	100	353	100	100	
57	Cakupan Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	%	-	100	100	100	100	-	100	252	100	100	-	100	252	100	100	
58	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dok	-	-	-	75	125	-	-	-	122	168	-	-	-	163	134	
59	Jumlah Perda dan Izin Usaha Peternakan Yang Diterbitkan	Dok	-	50	50	-	-	-	53	126	-	-	-	106	252	-	-	
60	Jumlah Rumah Potong Hewan Yang Diawasi	Unit	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	100	-	-	-	
61	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan /Kelompok Ternak	Rasio	-	1:14	1:13	-	1,13	-	1:14	0	-	1,13	-	100	100	-	100	
62	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh	%	-	100	100	-	100	-	100	100	-	100	-	100	100	-	100	
63	Jumlah Pertemuan Penyuluh	Kali	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100	100	-	-	
64	Jumlah Pelaksanaan Inventarisasi Data Kelompok Tani Ternak dan Perikanan	Kali	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-	-	
65	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	-	-	-	11	11	-	-	-	11	11	-	-	-	100	100	
66	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	-	-	-	921	921	-	-	-	921	921	-	-	-	100	100	

Tabel 2.6 Pencapaian IKU dan IKK Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Satuan	Relisasi				Kondisi Awal 2024	Target						Permasalahan (Analisis)
			2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	IKU (Tujuan dan Sasaran OPD)													
1	Laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan	%	1,21	1,33	1,34	1,3	1,29	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4	
2	Kontribusi subsektor Perikanan Terhadap PDRB	%	1,21	1,33	1,34	1,3	1,29	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4	
3	Laju pertumbuhan PDRB subsektor peternakan	%	4,19	4,23	4,17	4,3	0	0,3	0,5	0,75	0,9	1	1,25	
4	Kontribusi subsektor Peternakan Terhadap PDRB	%	4,19	4,23	4,17	4,3	4	5	7	8,5	9	9,5	10	
5	Predikat Nilai Sakip	Poin				70(B)	64,27 (B)	70 (B)	80 (BB)	80 (BB)	80 (BB)	90 (A)	90 (A)	
	IKK													
	Kontribusi Perikanan Terhadap PDRB	%	1,21	1,33	1,33 / 1,34	1,3	1,29	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4	
	Persentase peningkatan produksi perikanan	%	3,15	19,95	7,07	- 23,87	15,94	2	2	2	2	2	2	
	Kontribusi Peternakan Terhadap PDRB	%	4,19	4,23	4,17	4,3	4	4,29	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	
	Persentase peningkatan produksi peternakan	%		- 2,52	- 15,68	-3.92	8,58	8,5	9	9,5	10	10,5	11	
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	22,7	13,35	21	21	21	21	21	21	21	21	21	
	Persentase Penerbitan Usaha Bidang Peternakan	%	-	104	70	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 2.7 Jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026

PROGRAM	Anggaran pada Tahun ke ...			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke ...			Rata - Rata Pertumbuhan	
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
1	4	4	5	9	9	10	14	14	15	17	18
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	230.000.000	633.458.500	530.200.000	122.577.600	529.413.570	-	53	83,57	-	100.066.667	(40.859.200)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.684.000.000	901.241.000	500.000.000	214.991.715	66.500.000	-	8	7,37	-	(728.000.000)	(71.663.905)
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	20.000.000	7.039.500	30.000.000	10.000.000	-	-	50	-	-	3.333.333	(3.333.333)
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	200.000.000	1.364.046.000	1.532.000.000	728.503.413	4.050.000	-	364	0,29	-	444.000.000	(242.834.471)
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	1.045.500.000	1.100.000.000	-	-	-	-	-	-	366.666.667	-
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	253.575.000	133.041.500	440.000.000	177.751.300	6.000.000	-	70	4,5	-	62.141.667	(59.250.433)
Program Perizinan Usaha Pertanian	1.000.000	7.907.000	25.000.000	44.576.700	-	-	4.458	-	-	8.000.000	(14.858.900)
Program Penyuluhan Pertanian	6.500.000	297.411.000	40.000.000	235.964.000	-	-	3.630	-	-	11.166.667	(78.654.667)
Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	7.685.264.059	9.633.174.500	11.053.482.480	8.608.836.521	4.924.036.896	-	112	51,11	-	1.122.739.474	(2.869.612.174)

2.3.2 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tingkat capaian kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) tahun 2016-2019 Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2016-2019

No	PILAR LINGKUNGAN (Tujuan Ekosistem Lautan)		satuan	Capaian										Target RPJMD					Permasalahan (Analisis)
	No Indi	INDIKATOR		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	%	-	-	-	0,8	0,8	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	Tidak ada data yang tersedia
2	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	0	52	54	55	58	57	110,9	121,9	110	100	73	75	77	79	81	Masih terdapat beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang
3	14.b.1. (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	orang	0	0	0	156	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	tidak adanya asuransi nelayan

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Ada beberapa kelompok yang menjadi sasaran layanan berdasarkan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- Kelompok masyarakat peternak
- Kelompok masyarakat pembudidaya ikan
- Kelompok masyarakat nelayan

2.5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan bidang peternakan dan perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perhatian atas mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak dapat diabaikan. Isu yang diuraikan menjelaskan suatu keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan memberikan dampak yang signifikan di masa datang dan akan berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang peternakan dan bidang perikanan.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Permasalahan Per Urusan	Data/ Analisis pendukung
I.	Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	
1	Rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM peternak, pembudidaya dan nelayan	Dibutuhkan kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan magang bagi SDM.
2	Terbatasnya pembudidaya dan nelayan terhadap permodalan	Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Nelayan dan pembudidaya adalah kurangnya modal usaha sehingga diperlukan peranan dari pihak terkait agar bisa diberi kemudahan dalam hal permodalan.
3	Rusaknya lingkungan dan ekosistem danau	Keberlangsungan hidup ekosistem yg ada di Danau ditentukan oleh kondisi lingkungan disekitar. Kondisi lingkungan yang tidak baik mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada sehingga dapat mengakibatkan turunnya produksi perikanan.
4	Belum optimalnya perlindungan sumber daya ikan	- Pengelolaan perikanan tangkap bertujuan untuk mewujudkan usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan. Untuk itu, laju penangkapan ikan harus tidak melebihi potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) dari sumber daya ikan dalam suatu wilayah perairan - Perda No. 4 Tahun 2010 (Pengelolaan Sumberdaya Perikanan pada Perairan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang)

No.	Permasalahan Per Urusan	Data/ Analisis pendukung
II.	Urusan Bidang Pertanian	
1	Produktifitas usaha peternakan terutama produk ayam petelur mengalami penurunan	Peningkatan Kegiatan Vaksinasi dan Biosecurity sesuai SOP
2	Fluktuasi harga komoditas peternakan	
3	Belum optimalnya produksi dan produktifitas peternakan	- Peningkatan fungsi sarana dan prasarana kesehatan ternak,
4	Belum optimalnya perlindungan pemotongan betina produktif	Perda No 4 Tahun 2016 (Pengendalian Penjualan Ternak Betina Produktif)

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat empat aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu aspek arahan RPJMD, pelayanan perangkat daerah, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan bidang urusan seperti termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bidang Urusan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
I	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi Perikanan	Melampaui (>)	Kurangnya prasarana Terjadinya sedimentasi dan pendangkalan per	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
2	Konsumsi Ikan	Sesuai(=)	Bergesernya pola konsumsi masyarakat dari produk perikanan ke produk peternakan	Ketersediaan ikan dan pola konsumsi masyarakat
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya alokasi anggaran untuk kelompok nelayan	Alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Belum Tercapai (<)	Minimnya sarana penangkapan ikan yang memadai	Ketersediaan Sarana Penangkapan Ikan Yang Memadai
			Adanya spesies baru (ikan sapu-sapu) yang mempengaruhi aktifitas penangkapan ikan	Penanganan yang tepat terhadap ikan sapu-sapu

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<), Sesuai (=), Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
			Menurunnya produktifitas danau	Penanganan pencemaran dan sedimentasi di danau serta peningkatan kegiatan restocking
II	Pertanian			
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Belum Tercapai (<)	Terbatasnya pengadaan vaksin, obat-obatan dan biaya operasional petugas	1. Vaksinasi Massal 2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi)
2	Produksi daging	Belum Tercapai (<)	Adanya beberapa kasus penyakit	Peningkatan manajemen kesehatan (biosecurity)
			Belum maksimalnya program IB	Peningkatan tingkat adopsi peternak terhadap teknologi IB
			Menurunnya jumlah populasi ternak	Peningkatan pemanfaatan lahan penggembalaan dan HMT
			Pemotongan betina produktif	Sosialisasi pelarangan pemotongan betina produktif
			Sistem pemeliharaan belum intensif	KIE cara pemeliharaan secara intensif
3	Produksi telur	Belum Tercapai (<)	Jumlah dan kualitas DOC rendah	Memaksimalkan manajemen indukan/parentstock
			Biaya produksi tinggi	Penyediaan pakan yang berkualitas oleh pabrik pakan lokal
			Kualitas pullet belum maksimal	Peningkatan manajemen pemeliharaan
			Adanya penyakit ternak	Peningkatan manajemen kesehatan/biosecurity

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa ada 1 indikator yang melampaui target, 1 indikator yang memenuhi target dan 5 (lima) indikator yang belum mencapai target.

2.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

Mengacu pada RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2032, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang akan memperhatikan rencana pengembangan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Kabupaten meliputi: (a). Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Nasional yang terkait dengan wilayah kabupaten; dan (b). Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten.

Kawasan budidaya nasional yang terkait dengan wilayah provinsi meliputi kawasan andalan darat, dan kawasan andalan laut. Sedangkan untuk bidang Peternakan dan Perikanan terfokus pada kawasan andalan darat meliputi :

- a. Pengembangan Komoditas Unggulan di seluruh kecamatan.
- b. Pengolahan Kawasan Andalan peternakan dan perikanan serta pengolahannya..
- c. Pengembangan Bioteknologi penunjang budidaya ternak

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan peternakan dan perikanan.

- Untuk kawasan peternakan kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan peternakan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang peternakan dan kegiatan penelitian.
- Untuk kawasan perikanan, kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, pembangunan sarana dan prasarana menunjang perikanan, kegiatan penelitian, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.

Hasil telaahan RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang sehubungan dengan permasalahan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya	- Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian	- Belum optimalnya perlindungan lahan berkelanjutan	- Adanya UU No. 41 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Adanya Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan - Adanya Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
			- Masyarakat masih menganggap sektor properti masih mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi dibanding kawasan budidaya pertanian	- Penegakan hukum bagi pelaku alih fungsi lahan agar ditindak tegas sesuai dengan aturan - Potensi SDA dan SDM tersedia untuk pengembangan kawasan pertanian

Berdasarkan hasil analisa kajian KLHS terhadap pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diuraikan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorong diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang menyebabkan kerusakan struktur tanah	* Kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai teknologi pertanian yang ramah lingkungan	* Penggunaan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida secara tidak bijaksana	* Undang – Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2	Penurunan kualitas tanah akibat limbah pertanian	* Minimnya anggaran yang mendukung program/kegiatan pertanian organik	Perilaku petani dalam pengelolaan lahan yang tanpa disadari telah menyebabkan turunnya kualitas lingkungan hidup, misalnya pembakaran lahan pertanian untuk pertanaman baru	* Penerapan secara optimal teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Kerjasama seluruh stakeholder sektor pertanian

2.7. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan peternakan dan perikanan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan peternakan dan perikanan karena dampaknya signifikan di masa mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 2) harga sarana produksi peternakan dan perikanan; 3) kelembagaan pelaku

usaha peternakan dan perikanan; 4) terbatasnya permodalan. Isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan*

Kondisi produktivitas komoditas peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh peternak dan pembudidaya di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi peternakan dan perikanan. Selanjutnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas peternakan dan perikanan strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan peternakan dan perikanan secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.

Selain itu, sebagian besar produksi peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong peternak dan pembudidaya agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

2. *Harga Sarana Produksi Peternakan dan Perikanan*

Pendapatan petani ternak, pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah produk hasil peternakan dan perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurunnya keuntungan dan pendapatan.

3. *Kelembagaan Pelaku Usaha Peternakan dan Perikanan*

Kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

4. *Terbatasnya Permodalan*

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak untuk mendukung usaha ternak, budidaya perikanan ataupun perikanan tangkap sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas maupun kuantitas. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarakat petani ikan, peternak dan nelayan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani, peternak dan nelayan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Peternakan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Tema Pembangunan Kabupaten Sidrap tahun 2026 adalah “**Ketahanan Pangan, SDM Unggul dan Ekonomi Berkelanjutan**” dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri Unggulan untuk Mewujudka Ketahanan Pangan
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan unggul dan kesehatan berkualitas
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Hijau Berkelanjutan
5. Pengembangan kehidupan sosial yang kondusif, berbudaya, dan religius
6. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan
7. Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas untuk Mendukung Ekonomi Daerah.

Tujuan pembangunan Peternakan dan Perikanan periode 5 (lima) tahun kedepan yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Produktivitas sub sektor peternakan dan perikanan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah

1. Meningkatnya Produksi hasil peternakan
2. Meningkatnya Produksin hasil perikanan

Berdasarkan uraian di atas tujuan dan sasaran dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang serta tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang maka harus diselaraskan antara keduanya. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	RPJMD		Renstra PD	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	MenginkatnyaProduksi dan Produktivitas sektor Pertanian	Meningkatkan produktivitas sub sektor Peternakan dan Perikanan	Meningkatnya produksi hasil peternakan dan perikanan

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan di uraikan pada tabel berikut ini

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN											
- Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktivitas sub sektor Perikanan dan Peternakan		Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (%)	1,29	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4	
			Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan (%)	4,17	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
		Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	15	2	2	2	2	2	2	
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)	8,16	8,5	9	9,5	10	10,5	11	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip (point)	64,27	70	80	80	80	90	90	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah berisikan perencanaan program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi sehingga dapat mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus di pedomani Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Strategi dan arah kebijakan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 – 2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029.

VISI: "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera"			
MISI I: "Membangun Struktur Perekonomian Daerah yang Kuat melalui Percepatan Pengembangan Agrobisnis menuju Agroindustri pada Sektor Pertanian, Perkebunan Peternakan dan Perikanan"			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan produktivitas sektor – sektor	1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan	Meningkatkan daya saing produk peternakan dan perikanan secara beriringan dengan	Pemenuhan sarana prasarana produksi peternakan dan perikanan

perekonomian daerah	2. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta pemenuhan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan	Penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan dan perikanan
			Penguatan daya saing produk berbasis inovasi pada proses agroindustri.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut tidak berarti program/kegiatan pembangunan operasional OPD selain yang diprioritaskan tidak berjalan, tetapi dengan penekanan strategi yang lebih rendah dibanding yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategi lebih rendah dimaksud adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Tabel. 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	Penguatan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan	Peningkatan kapasitas produksi perikanan	Menjaga stabilitas harga komoditas perikanan	Pengembangan kawasan perikanan
Pemetaan dan Identifikasi komoditas unggulan peternakan, pemenuhan sarana dan prasarana peternakan dan peningkatan SDM peternak dan petugas peternakan	Peningkatan sarana dan prasarana peternakan dan pengembangan infrastruktur peternakan	Penguatan sistem pengendalian hama penyakit ternak	Menjaga stabilisasi harga komoditi peternakan terutama telur dan daging	Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi berbasis peternakan

3.2.1. Penentuan Lokus Prioritas

Dalam menentukan lokus program prioritas daerah di kabupaten Sidenreng Rappang, pendekatan yang komprehensif dan strategis menjadi landasan utama untuk memastikan efektivitas implementasi visi "Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera" Tahun 2025-2029. Lokus penentuan program prioritas daerah didasarkan pada analisis mendalam terhadap potensi wilayah, karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, serta kebutuhan pembangunan yang bervariasi di setiap kecamatan dan desa. Dengan pendekatan berbasis data yang kuat sejak tahap awal di tahun 2025, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi secara tepat wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi prioritas sesuai dengan tantangan dan potensi yang dimiliki

Tabel 3.5 Penentuan Lokus Prioritas

No.	Sasaran	Keluaran	Lokasi Prioritas
	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor Perikanan	Pengembangan Kawasan Budiaya Perikanan dan Pengembangan kapasitas penyuluh	Di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
		Peningkatan kesejahteraan nelayan tangkap	Desa Mojong, Wette'E, Teteaji dan Desa Lagading.
	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor Peternakan	Peningkatan Kualitas SDG Hewan Ternak serta layanan Kesehatan hewan.	Di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB VI

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD dan Pendanaan

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan selama kurun waktu 2025–2029 akan dilaksanakan sesuai dengan cakupan masing-masing program yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program sebagai berikut:

I. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap

2. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

II. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatannya adalah :

1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota

III. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatannya adalah :

- 1. Pengawasan Sumberdaya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

IV. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatannya adalah :

- 1. Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Miroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

- 2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan /Pakan/Tanaman skala kecil.

- 3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- b. Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- c. Pengadaan Benih Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

V. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatannya adalah :

- 1. Pembangunan Prasarana Pertanian

Sub Kegiatannya adalah :

- b. Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak
- c. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan
- d. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan.

VI. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatannya adalah :

1. Penjaminan Ketersediaan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
- b. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
- c. Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
- b. Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
- c. Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan
- d. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
- e. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

VII. Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Penerbitan Izin Usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/Kota.

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan sandar dan Izin Usaha Pertanian.

2. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

VIII. Program Penyuluhan Pertanian

Kegiatannya adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatannya adalah :

- a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

IX. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatannya adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - b. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan pada tabel berikut.

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERA PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					10.367.744.000,00		10.740.851.600,00		11.040.141.890,00		11.025.538.909,00		11.121.139.403,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.447.744.000,00		9.639.051.600,00		9.835.141.890,00		9.915.538.909,00		9.956.139.403,00	
Menginkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	9.447.744.000,00	100	9.639.051.600,00	100	9.835.141.890,00	100	9.915.538.909,00	100	9.956.139.403,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					320.000.000,00		350.000.000,00		380.000.000,00		410.000.000,00		440.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.334	2.380,68	2.428,29	320.000.000,00	2.476,86	350.000.000,00	2.526,4	380.000.000,00	2.576,92	410.000.000,00	2.628,46	440.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					600.000.000,00		726.800.000,00		790.000.000,00		660.000.000,00		680.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.240,78	1.265,59	1.290,91	600.000.000,00	1.316,72	726.800.000,00	1.343,06	790.000.000,00	1.369,92	660.000.000,00	1.397,32	680.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					20.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	71	73	75	20.000.000,00	77	25.000.000,00	79	35.000.000,00	81	40.000.000,00	83	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.354.327.970,00		1.605.000.000,00		1.564.460.767,00		1.663.306.844,00		1.889.037.528,00	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					920.000.000,00		980.000.000,00		1.030.000.000,00		1.130.000.000,00		1.220.000.000,00	
Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata	Jumlah Produksi Daging (Kg)	2.541.476	3.062.800	3.164.073	920.000.000,00	3.270.129	980.000.000,00	3.381.264	1.030.000.000,00	3.497.793	1.130.000.000,00	3.733.931	1.220.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Jumlah Produksi Telur (Kg)	45.031.501	46.450.695	47.989.756		49.586.632		51.243.987		52.964.637		56.560.490		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		70.000.000,00	
Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	95,24	0	100	10.000.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					352.327.970,00		550.000.000,00		449.460.767,00		428.306.844,00		474.037.528,00	
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	21	21	21	352.327.970,00	21	550.000.000,00	21	449.460.767,00	21	428.306.844,00	21	474.037.528,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					37.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	100	100	100	37.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00	
Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)	1:18	1:20	1:19	35.000.000,00	1:21	45.000.000,00	1:20	55.000.000,00	1:22	65.000.000,00	1:21	85.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
TOTAL KESELURUHAN					11742071970.00		12345851600.00		12604602657.00		12688845753.00		13010176931.00	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

FINAL RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN							
- Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Produktivitas Sektor Pertanian	Meningkatkan Produktivitas sub sektor Perikanan dan Peternakan				Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (%)		
					Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan (%)		
		Meningkatnya produksi hasil perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)		
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
			Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
				Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		
			Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		
				Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
			Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
				Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
				Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani		Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
				Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Persentase Peningkatan Produksi Peternakan (%)		
		Meningkatnya produksi hasil peternakan	Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata		Jumlah Produksi Daging (Kg)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah Produksi Telur (Kg)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Akseptor Yang Dilayani	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
				Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	
				Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.08 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.08 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.08 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	3.27.02.2.08.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	3.27.02.2.08.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
					Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	3.27.02.2.08.0004 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi		Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0011 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner		Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
					Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah wilayah yang dilakukan surveillans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
						Jumlah kader zoonosis (Orang)	3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis
						Jumlah wilayah yang dilakukan surveillans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveillans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
				Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Persentase penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04.0008 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
					Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	
					Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	
			Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian		Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	3.27.08 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
					Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	3.27.08.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	3.27.08.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
					Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	3.27.08.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
					Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	3.27.08.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	
			Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani		Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak (Rasio)	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap pelaku Utama Peternakan/Kelompok Ternak	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Nilai Sakip (poin)		
				Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tingkat Ketepatan Waktu pelpaoran Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.25.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.08 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.25.01.2.08.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.08.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0008 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.25.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.08.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.08.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				10.387.744.000,00		10.740.851.800,00		11.040.141.890,00		11.025.538.909,00		11.121.139.403,00		
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.447.744.000,00		9.639.051.800,00		9.835.141.890,00		9.915.538.909,00		9.956.139.403,00		
Menginkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	9.447.744.000,00	100	9.639.051.800,00	100	9.835.141.890,00	100	9.915.538.909,00	100	9.956.139.403,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		16.000.000,00		
Tingkat Ketepatan Waktu pelpaoran Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	16.000.000,00	5	16.000.000,00	5	16.000.000,00	5	16.000.000,00	5	16.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
3.25.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.029.979.000,00		9.221.286.800,00		9.417.376.890,00		9.497.773.909,00		9.538.374.403,00		
Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	9.029.979.000,00	12	9.221.286.800,00	12	9.417.376.890,00	12	9.497.773.909,00	12	9.538.374.403,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.264	1.582		1.788		2.020		2.272		2.555			
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.024.979.000,00		9.216.286.800,00		9.412.376.890,00		9.492.773.909,00		9.533.374.403,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.264	1.582	9.024.979.000,00	1.788	9.216.286.800,00	2.020	9.412.376.890,00	2.272	9.492.773.909,00	2.555	9.533.374.403,00		
3.25.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00		69.000.000,00		
Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	50	69.000.000,00	40	69.000.000,00	40	69.000.000,00	40	69.000.000,00	40	69.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	150		150		150		150					
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12		12		12		12					
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	37	50	4.000.000,00	40	4.000.000,00	40	4.000.000,00	40	4.000.000,00	40	4.000.000,00		
3.25.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200	150	60.000.000,00	150	60.000.000,00	150	60.000.000,00	150	60.000.000,00	150	60.000.000,00		
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		47.000.000,00		
Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	47.000.000,00	3	47.000.000,00	3	47.000.000,00	3	47.000.000,00	3	47.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3		3		3		3					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10		10		10		10					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3		2		2		2		2			
3.25.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	3	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
3.25.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
3.25.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
3.25.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00	3	7.000.000,00		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				213.265.000,00		211.265.000,00		211.265.000,00		211.265.000,00		211.265.000,00		
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	35	12	213.265.000,00	12	211.265.000,00	12	211.265.000,00	12	211.265.000,00	12	211.265.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.25.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	35	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				53.265.000,00		51.265.000,00		51.265.000,00		51.265.000,00		51.265.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	53.265.000,00	12	51.265.000,00	12	51.265.000,00	12	51.265.000,00	12	51.265.000,00		
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	155.000.000,00	12	155.000.000,00	12	155.000.000,00	12	155.000.000,00	12	155.000.000,00		
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		74.500.000,00		
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	7	72.500.000,00	7	74.500.000,00	7	74.500.000,00	7	74.500.000,00	7	74.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	3		3		3		3		3			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10		15		15		15		15			
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	3	52.500.000,00	3	52.500.000,00	3	52.500.000,00	3	52.500.000,00	3	52.500.000,00		
3.25.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	10	5.000.000,00	15	7.000.000,00	15	7.000.000,00	15	7.000.000,00	15	7.000.000,00		
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.25.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				320.000.000,00		350.000.000,00		380.000.000,00		410.000.000,00		440.000.000,00		
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.334	2.428,29	320.000.000,00	2.478,86	350.000.000,00	2.526,4	380.000.000,00	2.576,92	410.000.000,00	2.628,46	440.000.000,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				280.000.000,00		305.000.000,00		335.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		
Persentase Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		15	280.000.000,00	15	305.000.000,00	15	335.000.000,00	15	360.000.000,00	15	380.000.000,00		
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				280.000.000,00		305.000.000,00		335.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)		15	280.000.000,00	15	305.000.000,00	15	335.000.000,00	15	360.000.000,00	15	380.000.000,00		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	90	40	40.000.000,00	40	45.000.000,00	40	45.000.000,00	40	50.000.000,00	40	60.000.000,00		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	90	40	40.000.000,00	40	45.000.000,00	40	45.000.000,00	40	50.000.000,00	40	60.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				600.000.000,00		726.800.000,00		790.000.000,00		660.000.000,00		680.000.000,00		
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.240,78	1.290,91	600.000.000,00	1.316,72	726.800.000,00	1.343,06	790.000.000,00	1.369,92	660.000.000,00	1.397,32	680.000.000,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				600.000.000,00		726.800.000,00		790.000.000,00		660.000.000,00		680.000.000,00		
Persentase Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		2	600.000.000,00	2	726.800.000,00	2	790.000.000,00	2	660.000.000,00	2	680.000.000,00		
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		416.800.000,00		440.000.000,00		360.000.000,00		380.000.000,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		2	300.000.000,00	2	416.800.000,00	2	440.000.000,00	2	360.000.000,00	2	380.000.000,00		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				300.000.000,00		310.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)		5	300.000.000,00	5	310.000.000,00	5	350.000.000,00	5	300.000.000,00	5	300.000.000,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				20.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya Kelestarian Laut dan Keanekaragaman Hayati	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)	71	75	20.000.000,00	77	25.000.000,00	79	35.000.000,00	81	40.000.000,00	83	45.000.000,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				20.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		415	20.000.000,00	415	25.000.000,00	415	35.000.000,00	415	40.000.000,00	415	45.000.000,00		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				20.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)		415	20.000.000,00	415	25.000.000,00	415	35.000.000,00	415	40.000.000,00	415	45.000.000,00		
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1.354.327.670,00		1.605.000.000,00		1.564.460.767,00		1.663.306.844,00		1.889.037.528,00		
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				920.000.000,00		980.000.000,00		1.030.000.000,00		1.130.000.000,00		1.220.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata	Jumlah Produksi Daging (Kg)	2.541.476	3.164.073	920.000.000,00	3.270.129	980.000.000,00	3.381.264	1.030.000.000,00	3.497.793	1.130.000.000,00	3.733.931	1.220.000.000,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	Jumlah Produksi Telur (Kg)	45.031.501	47.989.756		49.588.632		51.243.987		52.964.637		56.560.490			
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		
Persentase Akseptor Yang Dilayani	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		12	40.000.000,00	12	55.000.000,00	12	57.000.000,00	12	60.000.000,00	12	55.000.000,00		
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				40.000.000,00		55.000.000,00		57.000.000,00		60.000.000,00		55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)		12	40.000.000,00	12	55.000.000,00	12	57.000.000,00	12	60.000.000,00	12	55.000.000,00		
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		18.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Temak	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	12	18.000.000,00	12	20.000.000,00		
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Keil				15.000.000,00		16.000.000,00		17.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		
Terawasinya Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	12	12	15.000.000,00	12	16.000.000,00	12	17.000.000,00	12	18.000.000,00	12	20.000.000,00		
3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				865.000.000,00		909.000.000,00		956.000.000,00		1.052.000.000,00		1.145.000.000,00		
Persentase Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak	Jumlah bibit temak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	4.000	865.000.000,00	4.000	909.000.000,00	4.500	956.000.000,00	5.000	1.052.000.000,00	5.500	1.145.000.000,00		
	Jumlah Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0		0		1		0		1			
	Jumlah benih temak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0	4.500		4.500		4.500		4.500		5.000			
3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0,00		0,00		30.000.000,00		0,00		35.000.000,00		
Tersedianya Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	0	0,00	1	35.000.000,00		
3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				480.000.000,00		510.000.000,00		500.000.000,00		590.000.000,00		610.000.000,00		
Tersedianya bibit temak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit temak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	0	4.000	480.000.000,00	4.000	510.000.000,00	4.500	500.000.000,00	5.000	590.000.000,00	5.500	610.000.000,00		
3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				385.000.000,00		399.000.000,00		426.000.000,00		462.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya benih temak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih temak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0	4.500	385.000.000,00	4.500	399.000.000,00	4.500	426.000.000,00	4.500	462.000.000,00	5.000	500.000.000,00		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		70.000.000,00		
Terwujudnya Prasarana Pertanian yang Mendukung Efisiensi Produksi	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian (%)	95,24	100	10.000.000,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	100	70.000.000,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	70.000.000,00		
	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1		0		0		0		0			
3.27.03.2.02.0011 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak				0,00		0,00		0,00		0,00		35.000.000,00		
Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000.000,00		
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				0,00		0,00		0,00		0,00		35.000.000,00		
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	35.000.000,00		
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				352.327.970,00		550.000.000,00		449.460.767,00		428.306.844,00		474.037.528,00		
Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	21	21	352.327.970,00	21	550.000.000,00	21	449.460.767,00	21	428.306.844,00	21	474.037.528,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				242.327.970,00		420.000.000,00		263.460.767,00		261.306.844,00		286.037.528,00		
Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	22	242.327.970,00	22	420.000.000,00	22	263.460.767,00	22	261.306.844,00	22	286.037.528,00		
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	11		11		11		11		11			
	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
3.27.04.2.01.0004 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis				30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	0	22	30.000.000,00	22	35.000.000,00	22	45.000.000,00	22	45.000.000,00	22	50.000.000,00		
3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	0	11	12.000.000,00	11	15.000.000,00	11	20.000.000,00	11	25.000.000,00	11	27.000.000,00		
3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.327.970,00		370.000.000,00		198.480.787,00		191.308.844,00		209.037.528,00		
Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	12	12	200.327.970,00	12	370.000.000,00	12	198.480.787,00	12	191.308.844,00	12	209.037.528,00		
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		
Jumlah Pengawasan Pemasukan dan pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	0	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	28.000.000,00		
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		28.000.000,00		
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	0	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00	12	28.000.000,00		
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	0	2.000	10.000.000,00	2.000	15.000.000,00	2.000	20.000.000,00	2.000	20.000.000,00	2.000	25.000.000,00		
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	0	2.000	10.000.000,00	2.000	15.000.000,00	2.000	20.000.000,00	2.000	20.000.000,00	2.000	25.000.000,00		
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				90.000.000,00		100.000.000,00		148.000.000,00		122.000.000,00		135.000.000,00		
Persentase penerapan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	0	24	90.000.000,00	24	100.000.000,00	24	148.000.000,00	24	122.000.000,00	24	135.000.000,00		
	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0		0		4		0		0			

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	5		5		5		5		5			
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12.000.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	0	12	12.000.000,00	12	15.000.000,00	12	18.000.000,00	12	20.000.000,00	12	25.000.000,00		
3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				8.000.000,00		10.000.000,00		13.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		
Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	0	24	8.000.000,00	24	10.000.000,00	24	13.000.000,00	24	15.000.000,00	24	20.000.000,00		
3.27.04.2.04.0007 - Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan				0,00		0,00		40.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	4	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
3.27.04.2.04.0008 - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	0	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00		
3.27.04.2.04.0010 - Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik (Unit Usaha)	0	5	20.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	27.000.000,00	5	30.000.000,00		
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				37.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)	100	100	37.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	3.25.3.27.0.00.01.00 00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.27.06.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				17.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	1	17.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
3.27.06.2.01.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian				17.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	0	1	17.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.06.2.02 - Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	150	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	25.000.000,00	150	25.000.000,00		
3.27.06.2.02.0001 - Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Temak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan (Dokumen)	150	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	20.000.000,00	150	25.000.000,00	150	25.000.000,00		
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		
Meningkatnya Kompetensi Penyuluh Dan Kelompok Tani	Rasio Penyuluh Peternakan Terhadap Pelaku Utama Peternakan/Kelompok Temak (Rasio)	1:18	1:19	35.000.000,00	1:21	45.000.000,00	1:20	55.000.000,00	1:22	65.000.000,00	1:21	85.000.000,00	3.25.3.27.0.00.01.00 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				35.000.000,00		45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		85.000.000,00		
Rasio Penyuluhan Peternakan Terhadap pelaku Utama Peternakan/Kelompok Temak	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		1.341	35.000.000,00	1.341	45.000.000,00	1.341	55.000.000,00	1.341	65.000.000,00	1.341	85.000.000,00		
	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11	11		11		11		11		11			
3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa				15.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	11	11	15.000.000,00	11	25.000.000,00	11	30.000.000,00	11	35.000.000,00	11	45.000.000,00		
3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)		1.341	20.000.000,00	1.341	20.000.000,00	1.341	25.000.000,00	1.341	30.000.000,00	1.341	40.000.000,00		

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN				
1.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
			3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
2.	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3.	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Sarana Pertanian Berkualitas dengan Distribusi Merata	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Temak dan Hijauan Pakan Temak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
			3.27.02.2.06.0004 - Pengadaan Benih Temak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
4.	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
			3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.25.3.27.0.00.01.0000 - DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN									
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	%	1,29	1,35	1,38	1,37	1,38	1,39	1,4	
3.	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan	%	4,17	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	
4.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	15	2	2	2	2	2	2	
5.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	8,16	8,5	9	9,5	10	10,5	11	
6.	Nilai Sakip	poin	64,27	70	80	80	80	90	90	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
FINAL RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/ Kota	positif	Ton	3.822,00	3.898,52	3.976,49	4.058,02	4.137,14	4.219,89	4.304,28	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2025-2029.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauhmana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 seperti tercantum pada tabel di berikut ini:

Tabel 4.6. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0 (2024)	Tahun 1 (2025)	Tahun 2 (2026)	Tahun 3 (2027)	Tahun 4 (2028)	Tahun 5 (2029)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PERIKANAN							
1.	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (%)	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,3
	Persentase peningkatan produksi perikanan	15	2	2	2	2	2	2
	PETERNAKAN							
	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan (%)	4,17	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
1.	Persentase peningkatan produksi Peternakan	8,16	8,5	9	9,5	10	10,5	11

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 merupakan acuan kerja bagi Dinas Peternakan dan Perikanan hingga tahun 2029 dan sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Sasaran, program dan kegiatan dalam perubahan renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian dan rencana strategis provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam bentuk laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang ini.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2025



KEPALA DINAS



SUHARYA ANGRANI S. S.P., M.Si

NIP. 19781231 199711 2 001